

Analisis Peran DISDAGPERIN Terhadap Pengembangan IKM Di Kabupaten Boyolali

Mita purnamasari¹, Sherena Wahyutari²

^{1,2}Program Studi Manajemen, STIE Surakarta, Surakarta

¹Email: mithaaprnms15@gmail.com

²Email: sherena@stiesurakarta.ic.id

Received: November 19, 2025 Revised: November 27, 2025 Accepted: November 27, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DISDAGPERIN di Kabupaten Boyolali dalam perencanaan dan implementasi program pengembangan IKM. Boyolali memiliki potensi besar di sektor IKM, terutama pada industri logam, industri makanan olahan, dan industri kerajinan, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi digital, serta kurangnya inovasi produk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak DISDAGPERIN dan pelaku IKM binaan dinas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa DISDAGPERIN berperan penting sebagai fasilitator, pembina, dan koordinator dalam mendukung pengembangan IKM melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, fasilitas permodalan, legalitas usaha, serta promosi produk melalui pameran dan digital marketing. Implementasi program tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, serta kemandirian IKM di Boyolali, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran yang diberikan, pembinaan Sumber Daya Manusia, dan rendahnya kemampuan adaptasi teknologi pada sebagian pelaku IKM. Secara keseluruhan, peran DISDAGPERIN telah berjalan dengan efektif dalam memperkuat IKM di Boyolali, namun masih diperlukan peningkatan di aspek pemerataan program, kolaborasi lintas sektor, dan digitalisasi usaha agar daya saing IKM semakin optimal.

Kata Kunci: DISDAGPERIN; Industri Kecil Menengah (IKM); Pengembangan Ekonomi Daerah Boyolali; Pemerintah Daerah

Analysis Of The Role Of The Department Of Industry And Trade In Sme Development In Boyolali Regency

Abstract

This study aims to analyze the role of the Department of Industry and Trade (DISDAGPERIN) in Boyolali Regency in planning and implementing the SME development program. Boyolali has great potential in the SME sector, especially in the metal industry, processed food industry, and craft industry, but still faces obstacles such as limited capital, low digital literacy, and lack of product innovation. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation of the Department of Industry and Trade (DISDAGPERIN) and SME actors assisted by the department. The results of the study indicate that the Department of Industry and Trade (DISDAGPERIN) plays an important role as a facilitator, mentor, and coordinator in supporting SME development through skills training, business mentoring, capital facilitation, business legality, and product promotion through exhibitions and digital marketing. The

implementation of the program has had a positive impact on increasing production capacity, product quality, and the independence of SMEs in Boyolali, although there are still obstacles such as limited budget allocation, human resource development, and low technological adaptability among some SME actors. Overall, the role of DISDAGPERIN has been effective in strengthening SMEs in Boyolali, but improvements are still needed in the aspects of program equity, cross-sector collaboration, and business digitalization to optimize SME competitiveness. impulsive purchases in the digital marketplace.

Keywords: DISDAGPERIN; Small and Medium Industries (SMI); Boyolali Regional Economic Development; Regional Government

PENDAHULUAN

Boyolali adalah sebuah kabupaten yang berlokasi di provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, khususnya dalam sektor industri kecil dan menengah (IKM). Letak geografis Boyolali yang strategis, berada di antara dua kota besar yaitu Kota Surakarta dan Kota Semarang, menjadikan daerah ini sebagai jalur ekonomi penting yang dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha Wikipedia (2025). Pembangunan infrastruktur yang terus meningkat serta perhatian pemerintah daerah terhadap pemberdayaan ekonomi lokal menjadikan Boyolali sebagai salah satu daerah yang cukup dinamis dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Boyolali merupakan daerah penghasil susu perah segar terbesar di Jawa Tengah, Boyolali juga dikenal sebagai “Kota Susu” karena menjadi salah satu yang memproduksi susu sapi terbesar di Jawa Tengah. Selain itu Boyolali juga memiliki kota wisata, kota wisata adalah suatu kota yang memiliki daya tarik khusus bagi wisatawan, baik dari segi budaya, sejarah, maupun fasilitas yang mendukung kegiatan pariwisata yang ada di Boyolali seperti patung irung petruk yang berada di kecamatan Selo, new selo, air terjun kedung kayang dan Patung sapi lembu sora yang sekarang menjadi salah satu ikon di alun-alun Boyolali (Subitmele, 2025). Kota kuliner, kota kuliner adalah suatu kota yang memiliki keunikan makanan atau minuman yang khas sehingga dapat menarik wisatawan kuliner yang ada di Boyolali seperti soto seger, nasi tumpang, pecel, dan tahu susu (Buana, 2025). Selain itu Boyolali juga menjadi kota industri, kota industri adalah kota yang memiliki konsentrasi tinggi terhadap kegiatan industri dan manufaktur biasanya menjadi pusat produksi barang dan jasa, serta memiliki infrastruktur yang mendukung kegiatan industri. Contohnya industri tembaga dan kuningan, industri susu perah, industri tekstil, industri garmen, dan industri furniture (Raihan et al., 2024).

Kabupaten Boyolali dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi industri rumah tangga dan IKM yang cukup berkembang, khususnya di sektor makanan olahan, tekstil, furniture, kerajinan tembaga, dan kuningan (Jalil & Mustaqomah, 2021). Namun, dalam perkembangannya IKM masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, rendahnya inovasi produk, serta terbatasnya kemampuan pemasaran. Kondisi ini menuntut peran aktif dari DISDAGPERIN sebagai pembina dan fasilitator utama dalam membangun ekosistem usaha kecil yang tangguh dan berdaya saing (Badan Pusat Statistik, 2022).

Seiring dengan berkembangnya perekonomian di kabupaten Boyolali, peran dari pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan untuk menjaga kearifan lokal maupun *startup* yang ada di kabupaten Boyolali. Melalui peran dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN) Kabupaten Boyolali merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang perdagangan dan perindustrian, termasuk pengembangan sektor IKM. DISDAGPERIN kabupaten Boyolali berdiri sejak tahun 2000 hingga sekarang, DISDAGPERIN ini sangat berpengaruh dalam pengembangan ekonomi daerah. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengembangan perdagangan dan industri. Menurut BPK (2014) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (1) huruf n: "Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi bidang perdagangan dan perindustrian." artinya dalam pelaksanaan nya

DISDAGPERIN memiliki fungsi utama yaitu memiliki keterkaitan peran dinas yang menangani sektor industri dalam pengembangan IKM. hingga memberikan fasilitas pemasaran modal kepada pelaku IKM (Wahyudi, 2022). DISDAGPERIN kabupaten Boyolali menjadi instansi yang memiliki peran dalam mengembangkan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pelaku IKM. DISDAGPERIN hadir sebagai lembaga untuk sebagai pembina dan fasilitator yang bertugas untuk memberikan pelatihan keterampilan, mendampingi pelaku usaha dalam proses legalitas usaha, memfasilitasi permodalan, dan membuka akses promosi produk melalui pameran. Pendekatan yang dilakukan DISDAGPERIN kepada IKM lebih bersifat pendampingan. DISDAGPERIN berupaya agar pelaku IKM tidak hanya mampu bertahan di Boyolali saja, tetapi juga berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional, maupun internasional.

Pelaku IKM sendiri merupakan masyarakat lokal yang memiliki suatu perusahaan yang memproduksi suatu produk yang akan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup (Klikpajak, 2025). Di Kabupaten Boyolali, IKM berkembang sebagai sektor unggulan yang mampu mendukung pendapatan daerah, menyerap tenaga kerja masyarakat lokal, dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam. Pelaku IKM di Boyolali sebagian besar berasal dari masyarakat lokal yang memulai usaha secara mandiri, baik dari skala rumah tangga, usaha keluarga, maupun kelompok atau komunitas. Mereka bergerak di berbagai bidang seperti kuliner, logam, *furniture*, mebel, kerajinan tangan, hingga pengolahan hasil peternakan dan pertanian. Berikut adalah data menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menurut nilai investasinya dari industri besar dan industri sedang.

Tabel 1. Jumlah Industri Besar dan Sedang Menurut BPS
Jumlah Industri Besar dan Sedang Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
Kecamatan di Kabupaten Boyolali.

Kecamatan	Industri Besar (Investasi > 10 M)	Industri Sedang (Investasi 200 juta-10M)
1. Selo	-	3.00
2. Ampel	5.00	10.00
3. Gladagsari	1.00	2.00
4. Cepogo	-	5.00
5. Musuk	-	-
6. Tamansari	-	-
7. Boyolali	-	5.00
8. Mojosongo	5.00	13.00
9. Teras	6.00	9.00
10. Sawit	2.00	6.00
11. Banyudono	4.00	10.00
12. Sambu	2.00	1.00
13. Ngemplak	1.00	16.00
14. Nogosari	2.00	6.00
15. Simo	-	2.00
16. Karanggede	-	-
17. Klego	1.00	1.00
18. Andong	-	1.00
19. Kemusu	-	-

20. Wonosegoro	-	-
21. Wonosamodro	-	-
22. Juwangi	-	-
Total	29.00	90.00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Ada kurang dari 22 kecamatan di boyolali yang memiliki IKM, dari data diatas ada 4 kecamatan yang unggul dalam nilai investasi, dari industri yang sedang nilai investasi dari 200 Juta sampai 10 Milyar ada di kecamatan Ampel, Mojosongo, dan Ngemplak. Lalu untuk industri besar yang nilai investasi tertinggi dengan nominal lebih dari 10 Miliar terdapat di Kecamatan Ampel, Mojosongo, Teras, dan Ngemplak. Berdasarkan data tersebut, karena belum dijelaskan jenis industri yang ada di masing-masing kecamatan, maka diperlukan peran DISDAGPERIN untuk melakukan pendataan terkait jenis-jenis industri yang beroperasi di Kabupaten Boyolali.

IKM mulai diresmikan oleh Bapak Presiden Ir. Joko Widodo sejak Senin, 30 Januari 2017 Peluncuran fasilitas tersebut secara simbolis dilakukan di sentra tumang desa Cepogo Kec, Cepogo, Boyolali (Humas, 2017). Dengan kemajuan teknologi, kebijakan otonomi daerah yang baru, serta peran aktif pemerintah dalam mendorong wirausaha lokal. Pelaku IKM seringkali dihadapkan pada keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap teknologi modern, dan kesulitan dalam menembus pasar yang lebih luas yaitu pasar internasional.

Masalah-masalah yang dihadapi IKM pada umumnya yaitu kurangnya modal, karena pelaku usaha hanya berfokus pada modal pribadi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) seperti kurangnya kemampuan untuk promosi, branding dan penggunaan digital marketing, terbatasnya akses teknologi dan inovasi Sebagian besar IKM menggunakan alat produksi sederhana dan tradisional, sehingga produksi tidak efisien, dan kualitas produk yang kurang konsisten. Minimnya pendampingan dan evaluasi lanjutan, meskipun ada bantuan dari pemerintah namun, biasanya informasi bantuan tidak sampai ke seluruh pelaku usaha.

Menurut teori dari Arsyad (1999) peran pemerintah dalam pemberdayaan itu ada 3 peranan yang dapat diambil oleh pemerintahan daerah yaitu: a. Sebagai *entrepreneur*, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan usaha atau bisnis; b. Sebagai koordinator, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menciptakan kebijakan; c. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan yang ada di daerahnya. Menurut penelitian Wicakson (2016) menemukan bahwa DISDAGPERIN di Malang berhasil menjalankan perannya sebagai fasilitator untuk memberikan pelatihan, bantuan peralatan, promosi produk, kebijakan sebagai penggerak kemajuan IKM. Lalu menurut penelitian Jayanto (2019) melalui penelitian di Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan peran DISDAGPERIN dalam pengembangan IKM belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia pembina, anggaran yang terbatas, serta minimnya intensitas pelatihan yang diberikan kepada pelaku IKM. Menurut Hartanti (2021) peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan UMKM, bagaimana peran kelurahan dalam mengembangkan UMKM di kelurahan Mangkubumen dalam membantu menyalurkan bantuan sarana dan prasarana, promosi usaha, serta kemitraan digital.

Berdasarkan studi kasus terdahulu meskipun telah dilakukan berbagai upaya, belum semua pelaku IKM mampu merasakan dampak maksimal dari kebijakan dan program yang sudah disediakan. Karena belum banyak meneliti di Boyolali maka penelitian ini cukup menarik untuk diteliti, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran DISDAGPERIN dalam mendukung para pelaku IKM di Boyolali, dan peran DISDAGPERIN sebagai fasilitator termasuk dalam hal pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi promosi maupun permodalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran DISDAGPERIN dalam perencanaan program pengembangan IKM di Kabupaten Boyolali, serta bagaimana bentuk implementasi program DISDAGPERIN dalam mendukung pertumbuhan dan kemandirian pelaku IKM di Kabupaten Boyolali.

TEORI

Teori Manajemen Publik

Menurut Frederickson (1997), menekankan bahwa teori manajemen publik adalah pentingnya tanggung jawab, mengenali aspirasi masyarakat kebijakan serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adhe (2017) dengan judul “Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kota Malang, peran aktif pemerintah daerah sebagai pembina dan fasilitator sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku IKM, dalam peran DISDAGPERIN hal ini berarti dinas harus mendengarkan kebutuhan IKM seperti pelatihan yang dibutuhkan, dan kesulitan apa yang terjadi dalam pemasaran produk, sebagai institusi publik harus mampu memberikan perlakuan yang adil dalam hal mengelola program, SDM, dan layanan kepada pelaku IKM secara efektif dan efisien.

Teori Pengembangan IKM

Menurut Brundtland (1987), menekankan bahwa pentingnya inovasi dan keberlanjutan dalam industri kecil dan menengah, pengembangan IKM perlu dilakukan supaya para pelaku IKM mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan, akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan inovasi teknologi. Habibah (2019) menjelaskan bahwa Peran Disperindag Kabupaten Banyuwangi dalam Pemberdayaan IKM Batik Tulis Desa Tampo DISDAGPERIN sangat berperan aktif dalam pengembangan IKM melalui pelatihan teknis, penyediaan modal, penyediaan alat, dan promosi. Supaya produk IKM dapat dikenal oleh masyarakat luas. Sebagai institusi pemerintah, DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali tidak hanya berfokus pada peningkatan produk sesaat akan tetapi juga berfokus pada peningkatan jangka panjang seperti memperhatikan kesejahteraan para pelaku IKM dan memperhatikan keseimbangan sosial dan lingkungan.

Teori Tentang DISDAGPERIN

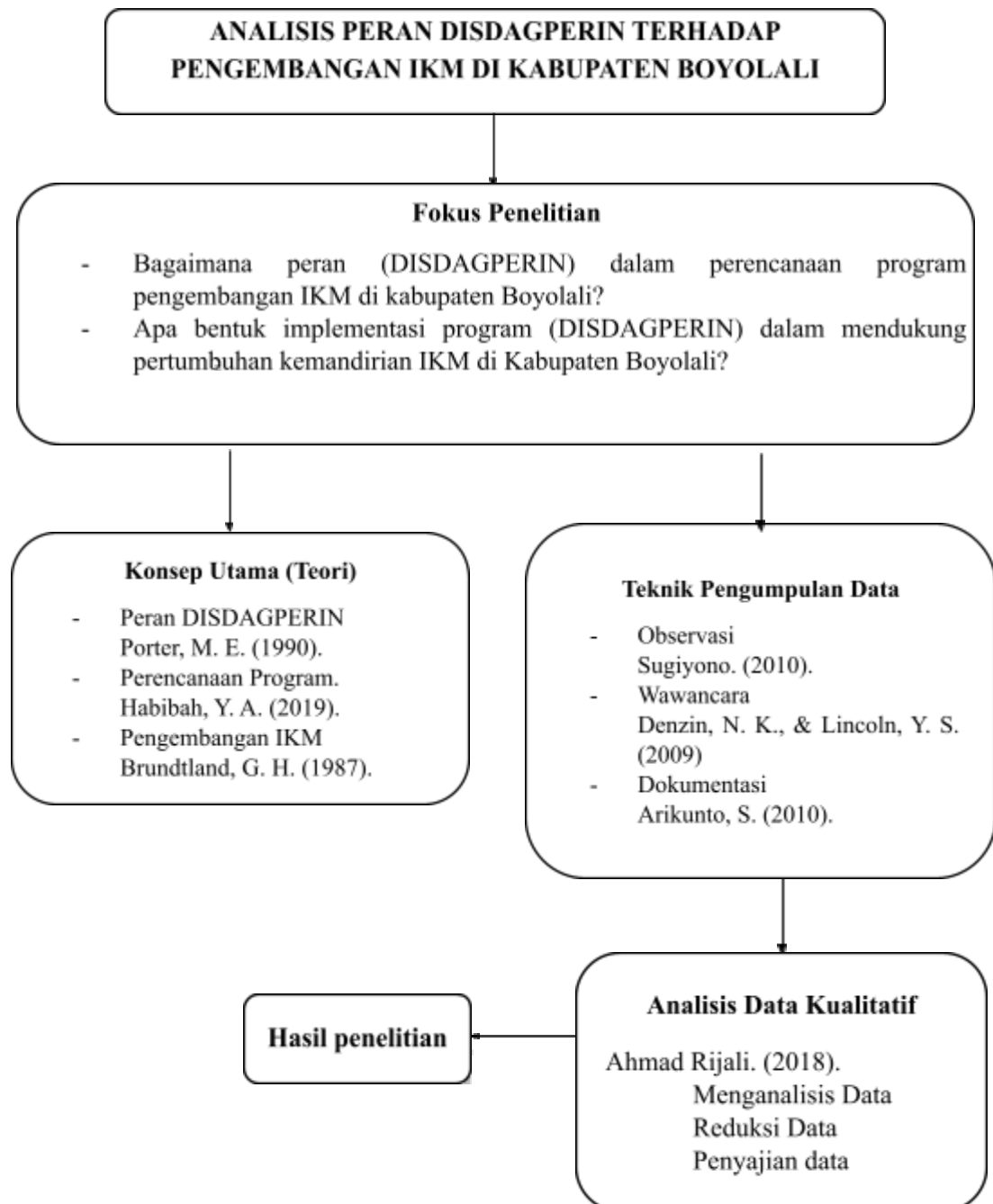
Menurut Porter (1990) teori ini berhubungan dengan pengelolaan sektor perdagangan dan industri, yang dapat merujuk pada model pengembangan ekonomi lokal. Teori ini relevan karena membantu menjelaskan bagaimana DISDAGPERIN dapat menciptakan ekosistem yang mendukung daya saing IKM di Boyolali. Handayani (2019), dalam penelitiannya dengan judul “Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dapat digunakan oleh DISDAGPERIN dalam IKM adalah dengan memanfaatkan peluang. Hal tersebut, menjelaskan bahwa daya saing industri tidak tumbuh secara alami, melainkan melalui perencanaan yang strategis dari institusi seperti DISDAGPERIN, DISDAGPERIN kabupaten Boyolali menjalankan peran aktif dalam mendorong keunggulan kompetitif IKM maka dari itu DISDAGPERIN sangat berperan dalam pengelolaan IKM sebagai fasilitator, sebagai pelaku usaha, dan pengatur strategi.

Teori Stakeholders dalam pelayanan publik

Menurut Raya et al. (2021), menyatakan bahwa stakeholder adalah proses perencanaan dan evaluasi layanan publik melibatkan semua pihak yang terlibat atau dipengaruhi oleh aktivitas organisasi, sehingga harus diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan, yang dimana IKM dipengaruhi supaya DISDAGPERIN tidak bekerja sendiri, melainkan harus melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama dalam pemberdayaan ekonomi. Putri (2017), dengan judul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tenun Ikat Parengan (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tenun Ikat Parengan (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Tidak hanya itu DISDAGPERIN kabupaten Boyolali juga melibatkan seluruh IKM secara aktif, untuk menyusun program berdasarkan

aspirasi pengguna layanan, serta menjaga keseimbangan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat selaku pelaku IKM.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Menurut Riduwan (2016), kerangka pikir adalah suatu gambaran alur sistematis yang menjelaskan bagaimana peneliti melihat dan menyusun masalah antara penelitian dengan teori-teori

yang digunakan. Serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul “Analisis Peran DISDAGPERIN Terhadap Pengembangan IKM di Kabupaten Boyolali” dari judul ini diturunkan ke fokus penelitian yang menjadi landasan utama dalam menganalisis data, batasan dari masalah yang diteliti untuk berfokus menjelaskan apa yang benar-benar menjadi inti dari penelitian. Untuk menjawab fokus penelitian tersebut, digunakanlah konsep utama teori, yaitu tentang peran lembaga pemerintah daerah DISDAGPERIN dan teori mengenai perencanaan program pengembangan IKM konsep ini berfungsi untuk mengkaji data yang diperoleh di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (Tiga) langkah: Pertama, observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek, peristiwa, atau fenomena secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi atau bagaimana kegiatan pengembangan IKM dilaksanakan; Kedua, wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung untuk mendapatkan informasi dari pihak terkait seperti staf DISDAGPERIN; Ketiga, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan dokumen atau catatan yang sudah ada untuk melengkapi data laporan program. Dari data yang diperoleh dianalisis menggunakan tahapan analisis data kualitatif, yang meliputi reduksi data, yaitu proses menyaring dan memilah informasi dengan fokus pada penelitian, penyajian data yaitu menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan supaya lebih mudah untuk dipahami, dan menarik kesimpulan, yaitu merupakan hasil akhir dari analisis untuk menjawab fokus penelitian secara keseluruhan. Dengan alur ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan mudah dipahami mengenai bagaimana peran DISDAGPERIN dalam pengembangan sektor IKM di kabupaten Boyolali secara efektif.

METODE PENELITIAN

Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh suatu individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial atau pengalaman pribadi. Artinya, Penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh seseorang terhadap suatu masalah sosial. Jadi pendekatan ini fokus pada makna dan pengalaman pribadi seseorang, bukan hanya sekedar pandangan menurut pribadi. Maka dari itu penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak bisa diukur menggunakan angka, tetapi memakai wawancara, dokumentasi sebagai datanya.

Objek dalam penelitian ini adalah DISDAGPERIN kabupaten Boyolali, narasumber Kabid Perindustrian kantor DISDAGPERIN, dan staf penginputan data IKM di DISDAGPERIN. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara terhadap pihak informan terkait yang telah ditentukan dari pihak DISDAGPERIN kabupaten Boyolali. Pengumpulan data tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai peran DISDAGPERIN dalam mengimplementasikan program yang mendukung pengembangan serta kemandirian pelaku IKM secara ekonomi agar bisa berkembang.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Putri (2017), jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara. Pendekatan kualitatif ini dikumpulkan berupa informasi secara lisan dari pihak yang memahami atau terlibat langsung yaitu pihak DISDAGPERIN kabupaten Boyolali dan pelaku IKM, pihak yang memahami mengenai peran Dinas terhadap perencanaan pengembangan IKM.

Sumber Data

Sumber data adalah suatu pihak yang memberikan informasi atau keterangan terkait penelitian, dalam hal ini sumber data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara oleh pihak DISDAGPERIN kabupaten Boyolali. Sedangkan sumber data sekunder dapat diperoleh berasal dari dokumen pendukung seperti laporan program kerja, atau arsip kegiatan. Menurut Bungin (2011), sumber data dibagi menjadi 2 (Dua) data yaitu primer adalah data yang diperoleh dari sumber data langsung di lapangan dengan cara wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi antar kelompok.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak DISDAGPERIN kabupaten Boyolali serta para pelaku IKM, guna memperoleh data yang aktual mengenai bentuk dukungan, program, kendala, dan dampak dari keterlibatan DISDAGPERIN kabupaten Boyolali dalam pengembangan IKM. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui dokumen, catatan, dan arsip. Dalam penelitian kualitatif, data sekunder digunakan untuk memahami konteks, seperti kebijakan, program pemerintah, atau tren statistik, yang bersumber dari laporan, arsip, buku, dan jurnal. Data ini mendukung dan melengkapi wawancara langsung.

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik dari sumber primer secara langsung maupun sekunder secara tidak langsung, agar dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan dari sebuah penelitian. Berikut ada beberapa metode untuk mengumpulkan data:

Metode observasi menurut Sugiyono (2010) Observasi adalah sebuah cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara visual dimana didukung oleh pendataan secara terperinci mengenai objek penelitian. Observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peran DISDAGPERIN kabupaten Boyolali dalam membina pelaku IKM yang bertujuan untuk mengamati kegiatan pelatihan keterampilan, sosialisasi perizinan usaha, pameran produk IKM, serta aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh pihak dinas kepada pelaku IKM binaan. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur, karena peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang sedang diamati, melainkan hanya sebagai pengamat. Peneliti mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan bentuk pelaksanaan program, keterlibatan DISDAGPERIN, bagaimana interaksi antara pihak dinas dengan pelaku IKM, serta respon atau partisipasi dari pelaku usaha terhadap kegiatan yang diberikan. Dengan tujuan mengetahui untuk menangkap dinamika dan praktik nyata peran DISDAGPERIN kabupaten Boyolali dalam mendukung pengembangan IKM di kabupaten Boyolali sehingga penelitian menjadi lebih valid dan mendalam.

Menurut Denzin (2009), wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung untuk memperoleh suatu informasi atau data dengan tujuan penelitian. Metode wawancara ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung peran DISDAGPERIN kabupaten Boyolali khusus nya pada bidang Industri dalam pengembangan IKM di Boyolali, melalui percakapan yang mendalam kepada para pelaku IKM dan beberapa staf DISDAGPERIN khususnya pada bagian industri

Menurut Arikunto (2010), dokumentasi adalah sebuah cara untuk memperoleh sebuah data berupa foto, laporan arsip, dan dokumen yang tertulis dan relevan. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan bukti tertulis berupa gambar, atau benda yang dapat mendukung dan memperkuat data dalam penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang mendukung peran DISDAGPERIN kabupaten Boyolali dalam pengembangan IKM di Boyolali. Berikut ada 3 definisi variabel sehingga dapat digunakan dalam pengumpulan dan analisis data.

1. Peran DISDAGPERIN

Menurut Hernita et al. (2021), peran DISDAGPERIN adalah menjadi penghubung antara pelaku usaha dan pasar, dan sebagai fasilitator untuk mendorong pertumbuhan IKM. Secara umum meliputi peran sebagai fasilitator, peran sebagai regulator, peran sebagai pembina, dan penghubung.

2. Perencanaan Program

Menurut menurut Robbins & Coulter (2007), perencanaan program adalah sebuah proses untuk menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta mencakup tahapan-tahapan seperti, memberi arah dan tujuan yang jelas, membentuk pedoman untuk mengurangi kepastian, memperkirakan peluang untuk masa depan, mencapai efisiensi biaya.

3. Pengembangan IKM

Menurut Sari (2015), pengembangan IKM dilakukan agar pelaku usaha mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan global, dengan dukungan dari pemerintah. Melalui beberapa upaya yang dilakukan seperti penyediaan fasilitas pasar, pelatihan, dan jaringan kerja sama antara pemerintah, dan sektor swasta.

Teknik analisis data

Berguna untuk mengolah dan memahami data yang telah dikumpulkan, agar bisa ditemukan jawaban dari tujuan atau masalah penelitian. Serta mengolah data mentah menjadi sebuah informasi yang bermakna, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif tahapan dalam analisis ini meliputi:

- a. Menganalisis data, menurut Rijali (2019) tahapan ini dilakukan setelah data dari lapangan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Peneliti mulai membaca dan menelaah seluruh data untuk memahami isi secara menyeluruh. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai peran DISDAGPERIN dalam pengembangan IKM di lokasi penelitian.
- b. Reduksi Data, menurut Rijali (2019) sebuah proses menyederhanakan dan menyaring informasi dalam kategori konsep, atau tema utama. Biasanya dalam bentuk diagram, atau tabel untuk lebih mudah terbaca. Reduksi data adalah suatu proses menyederhanakan dan menyaring informasi yang penting dan olah dalam bentuk diagram atau tabel supaya mudah untuk dibaca.
- c. Penyajian Data, menurut Rijali (2019) dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya disusun dalam bentuk uraian secara naratif yang menggambarkan hasil temuan secara rinci dan mendalam. Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk sebuah kalimat yang sudah disaring, diringkas, dan dikategorikan. Peneliti dapat menyisipkan kutipan langsung dari narasumber untuk memperkuat validitas data. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, data sering disajikan melalui tabel, grafik, atau diagram. Tujuannya agar peneliti lebih mudah menarik pola, hubungan antar kategori, serta kesimpulan yang valid.

HASIL

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali, diketahui bahwa dinas memiliki peran sangat penting sebagai fasilitator, pembina, dan regulator dalam menjalankan program pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Proses perencanaan program, DISDAGPERIN selalu melakukan pemetaan kebutuhan pelaku usaha berdasarkan sektor dan kapasitas produksinya agar setiap kegiatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Program yang dirancang tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pendampingan legalitas usaha, fasilitasi permodalan melalui kerja sama dengan perbankan, serta pelatihan digitalisasi pemasaran. Sesuai hasil penelitian dari Wicaksono (2016) yang menemukan bahwa DISDAGPERIN berperan aktif sebagai fasilitator dalam memberikan pelatihan dan pembinaan sesuai dengan bidang usaha pelaku IKM, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kualitas produk serta daya saing IKM.

Dalam tahap perencanaan, DISDAGPERIN juga berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti lembaga keuangan, asosiasi pelaku usaha, dan instansi terkait lainnya. Hal ini bertujuan agar setiap program yang dijalankan dapat memiliki dukungan lintas sektor yang kuat dan berorientasi pada kebutuhan untuk pelaku IKM. Kolaborasi semacam ini menjadikan Boyolali sebagai daerah yang mampu mengembangkan sektor industri kecil dan menengah secara lebih terarah dan berkelanjutan. Sebagaimana ditegaskan oleh penelitian Jatmikowati et al. (2020), dalam penelitiannya mereka menekankan pentingnya keterlibatan pihak pemerintah daerah, lembaga keuangan dan masyarakat pelaku usaha dalam proses perencanaan dan evaluasi layanan publik.

Dampak dari implementasi program tersebut terlihat nyata melalui peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, dan kemampuan manajerial pelaku IKM. Banyak pelaku usaha yang semula hanya beroperasi di skala rumah tangga kini berkembang menjadi usaha dengan sistem produksi yang lebih modern. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Habibah (2019) yang menyatakan bahwa pelatihan teknis, pendampingan usaha, dan fasilitasi promosi yang dilakukan oleh Disperindag berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemandirian dan kapasitas pelaku IKM.

PEMBAHASAN

Setiap tahun, perencanaan kegiatan dilakukan berdasarkan data IKM binaan dan hasil evaluasi program pada tahun sebelumnya, agar program yang dirancang tepat sasaran. Pelatihan juga dibedakan antara wirausaha baru dan IKM yang sudah berkembang, sehingga kebutuhan setiap kelompok dapat terlayani secara efektif. Perencanaan program ini mencerminkan peran DISDAGPERIN sebagai koordinator dan fasilitator, sesuai teori Arsyad (1999) serta Robbins & Coulter (2007) yang menyebutkan bahwa perencanaan program harus memiliki arah yang jelas, efisien, serta mengantisipasi perubahan lingkungan usaha.

Selain itu, DISDAGPERIN juga berperan sebagai penghubung antar lembaga, seperti bekerja sama dengan pihak perbankan untuk membantu permodalan, dan dengan perusahaan swasta dalam hal kemitraan produksi dan pemasaran. Misalnya, pada kegiatan pelatihan, pihak bank dihadirkan untuk memberikan edukasi tentang pinjaman usaha bunga rendah serta pengelolaan keuangan IKM. Peran DISDAGPERIN ini juga sesuai dengan teori Frederickson (1997) tentang manajemen publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan pelaku usaha langsung dalam perencanaan kegiatan, dinas mampu menciptakan kebijakan yang mampu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DISDAGPERIN Kabupaten Boyolali telah menjalankan peran perencanaan program pengembangan IKM secara efektif, melalui pendekatan berbasis kebutuhan, koordinasi lintas sektor, dan fokus pada peningkatan kapasitas pelaku IKM. Implementasi Program DISDAGPERIN dalam mendukung pertumbuhan dan kemandirian IKM di kabupaten Boyolali. Implementasi program pengembangan IKM yang dilakukan DISDAGPERIN diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas SDM, pendampingan legalitas usaha, promosi dan pameran produk, fasilitas akses permodalan, dan kerjasama kemitraan industri. Pelatihan yang diberikan meliputi teknis produksi, pengemasan, pemasaran digital, hingga pelatihan ekspor produk yang disesuaikan oleh masing-masing sektor pelaku IKM. Setelah pelatihan DISDAGPERIN juga melakukan monitoring dan pembinaan lanjutan untuk memastikan keberlanjutan program.

Selain itu pendampingan legalitas seperti NIB, sertifikasi halal, BPOM, dan HKI meningkatkan daya saing, sementara promosi dilakukan melalui pameran fisik dan pemasaran digital. Fasilitasi permodalan dan kerja sama dengan industri besar membantu pengembangan usaha lokal, sejalan dengan temuan Habibah (2019) mengenai pemberdayaan IKM melalui pelatihan, pendampingan, dan promosi.

Dampak dari implementasi program tersebut terlihat pada meningkatnya kapasitas produksi, kualitas produk, serta kemampuan pemasaran digital pelaku IKM. Beberapa IKM berhasil “naik kelas” dari skala rumah tangga menjadi usaha yang mampu memasarkan produk ke luar daerah, bahkan pasar nasional. Bertambahnya jumlah IKM “naik kelas”, beberapa IKM yang awalnya berskala rumah tangga kini sudah mampu memasarkan produknya secara mandiri ke luar daerah. Selain itu terbentuknya sentra-sentra industri baru di kecamatan Cepogo dan Mojosongo menunjukkan adanya pengembangan wilayah berbasis IKM. Hal ini sejalan dengan teori Brundtland (1987) yang menyatakan bahwa pengembangan ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek inovasi dan kemandirian masyarakat.

Namun pelaksanaan program juga menghadapi beberapa kendala, di antaranya keterbatasan literasi digital terutama bagi pelaku IKM berusia di atas 40 tahun, keterbatasan anggaran dan SDM, serta minimnya kolaborasi antar pelaku usaha, yang menyebabkan peningkatan kualitas IKM belum merata. Hasil ini sejalan dengan penelitian Jayanto (2019) yang menemukan bahwa DISDAGPERIN

Kabupaten Sidoarjo juga menghadapi kendala serupa, yaitu keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta rendahnya literasi teknologi pelaku IKM, sehingga program pengembangan belum berjalan optimal.

Keberhasilan peran DISDAGPERIN dalam pengembangan IKM dapat diukur melalui meningkatnya jumlah IKM yang naik kelas, peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk, kemandirian pelaku usaha dalam mengikuti pameran tanpa subsidi pemerintah, serta bertambahnya kemitraan antara IKM dan sektor industri besar. Hasil ini sejalan dengan penelitian Handayani (2019) yang menunjukkan bahwa strategi DISDAGPERIN dalam pengembangan IKM juga diukur melalui peningkatan kualitas produk, kemandirian usaha, serta kemitraan dengan sektor industri besar sebagai indikator keberhasilan program.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa DISDAGPERIN memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya mendorong pertumbuhan serta kemandirian IKM di daerah. Melalui fungsi sebagai fasilitator, pembina, dan regulator, dinas berupaya memperkuat daya saing pelaku IKM dengan melaksanakan berbagai program pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi permodalan dan pemasaran.

Dalam proses perencanaan, DISDAGPERIN menyusun program berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan IKM setiap tahun sehingga kegiatan yang dirancang menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Hasilnya terlihat dari meningkatnya jumlah IKM aktif, munculnya sentra industri baru, dan kemampuan pelaku IKM memasarkan produk secara mandiri.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kendala, seperti keterbatasan SDM yang menguasai teknologi, minimnya inovasi produk, dan keterbatasan anggaran pelatihan lanjutan. Meskipun begitu, secara keseluruhan peran DISDAGPERIN dapat dikatakan efektif dan berkesinambungan dalam mendorong pengembangan sektor IKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhe Filima Fandrianto. (2017). Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kota Malang. dari: <https://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2416>
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincoln. (1999). Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta, Bpfe. Diambil Dari Jurnal Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Rotan Di Kota Pekan baru Oleh Petir Petir Papilo.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2022. Jumlah Industri Besar dan Sedang Menurut Kecamatan di Kabupaten Boyolali. <https://www.bps.go.id>
- BPK. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah. Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future: The World Commission on Environment and Development*. Oxford: Oxford University Press.
- Buana, G. (2025). 20 Makanan Khas Boyolali yang Lezat dan Wajib Dicoba. MediaIndonesia.Com. https://mediaindonesia.com/kuliner/789233/20-makanan-khas-boyolali-yang-lezat-dan-wajib-dicoba#goog_rewarded

- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Frederickson, H. G. (1997). *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass.
- Habibah, Y. A. (2019). Peran Disperindag Kabupaten Banyuwangi dalam Pemberdayaan IKM Batik Tulis Desa Tampo. dari: <https://digilib.uinkhas.ac.id/13395/>
- Handayani, S. (2019). Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1). <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i2.3319>
- Hartanti, W. (2021). Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan Umkm. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 4(1). <https://doi.org/10.25134/ijsm.v4i1.3952>
- Hernita, H., Surya, B., Perwira, I., Abubakar, H., & Idris, M. (2021). Economic Business Sustainability and Strengthening Human Resource Capacity Based on Increasing the Productivity of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Makassar City, Indonesia. Sustainability. <https://doi.org/10.3390/su13063177>
- Humas. (2017). Kunker ke Jateng, Presiden Jokowi Akan ‘Launching’ Fasilitas Kemudahan Impor Bagi IKM. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/kunker-ke-jateng-presiden-jokowi-akan-launching-fasilitas-kemudahan-import-bagi-ikm/#:~:text=Usai peresmian Pasar Sambi%2C rombongan Presiden Jokowi,Kerajinan Tembaga Tumang%2C Kecamatan Cepogo%2C Kabupaten Boyolali>
- Jalil, A., & Mustaqomah, E. (2021). PEMBERDAYAAN UKM PENGRAJIN RUMAH TANGGA GUNA THE EMPOWERMENT OF THE SMALL HOME INDUSTRY OF HOUSEHOLD CRAFTSMEN TO INCREASE THE PRODUCTIVITY THROUGH THE. <https://doi.org/10.52561/abma.v1i2.140>
- Jatmikowati, S., Dinata, C., & Noorsetya, B. (2020). Strengthening Public Administration with Good Collaborative Governance (Government and Civil Society Organizations Relation for Development Countries in Decentralization Era: Case Studies in Malang Regency). , 179-185. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.197>
- Jayanto, D. (2019). Perencanaan Strategis Pengembangan Industri Kecil, Dan Menengah (Ikm) Unggulan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Studi Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo). dari: <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165979>
- Klikpajak. (2025). Pengertian dan Fungsi IKM dalam Perekonomian. <https://www.klikpajak.id>
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
- Putri, Trisanthi Marhendra (2017) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tenun Ikat Parengan (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. dari: <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/6001/>

- Raihan, A., Umrotun, U., & Musiyam, M. (2024). Analysis of Strategies of Geo-tourism Development in Boyolali, Indonesia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1357. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1357/1/012003>
- Raya, A., Andiani, R., Siregar, A., Prasada, I., Indana, F., Simbolon, T., Kinasih, A., & Nugroho, A. (2021). Challenges, Open Innovation, and Engagement Theory at Craft SMEs: Evidence from Indonesian Batik. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7, 121. <https://doi.org/10.3390/joitmc7020121>
- Riduwan. (2016). Dasar-Dasar Statistika. Alfabeta.
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2007). *Management*. Pearson Education.
- Subitmele, S. E. (2025). 19 Wisata Selo Boyolali dan Sekitarnya, Destinasi Alam Memukau di Antara Merapi dan Merbabu. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/hot/read/5108806/19-wisata-selo-boyolali-dan-sekitarnya-destinasi-alam-memukau-di-antara-merapi-dan-merbabu?page=5>
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sari, Tri Widiyanti Permata (2015). Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Era Globalisasi. dari: https://repository.ub.ac.id/id/eprint/117306/1/SKRIPSI_-_TRI_WIDIYANTI_PERMATA_SARI_-_115030107111062.pdf
- Trisanthi Marhendra Putri. (2017). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tenun Ikat Parengan.
- Wahyudi, R. (2022). Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Kota Medan. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(5), 671–676. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.75>
- Wikipedia. (2025). Boyolali. Wikipedia.Org. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boyolali
- Wicaksono, R. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Berbasis Agribisnis (Study Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya. dari: <https://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1314>